



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban DPMPTSP Kota Pekalongan atas pelaksanaan program kerja selama tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang tertuang dalam laporan ini merupakan derivasi dari visi "Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima" guna mendukung penuh pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Pekalongan. Melalui dua sasaran utama, yakni Peningkatan Investasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, laporan ini menyajikan informasi capaian nyata sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Kami senantiasa mengharapkan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang. Terimakasih.

Pekalongan, 24 Februari 2026
KEPALA DPMPTSP KOTA PEKALONGAN



ADE SUANGKAT, S.E
NIP. 19700616 198903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan (DPMPTSP) Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2025. DPMPTSP Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di DPMPTSP Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan DPMPTSP Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 77,8.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP DPMPTSP Kota Pekalongan 78,00 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,19 %.

2. Indikator nilai investasi sampai dengan tahun rencana, target yang ditetapkan 216,78 M.

Berdasarkan pelaporan kegiatan penanaman modal, bahwa untuk tahun 2025 total nilai investasi Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2025 2.031,19 Miliar. Sehingga capaian indikator nilai investasi sebesar 936,98%.

Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp4.476.607.259,-. Atau 89,10% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.024.521.000,-.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	6
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	9
1.5 ISU STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026	13
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 PENGUKURAN KINERJA	26
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	29
3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan	32
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	52
3.5 INOVASI	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
I. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	
II. Indikator Kinerja Utama Perubahan 2021-2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 2 Target Sasaran Kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan	24
Tabel 2. 3 Target Sasaran Kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ..	24
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	25
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	30
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	30
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	31
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026	32
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional.....	33
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025.....	33
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	34
Tabel 3.8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Tahun 2025	35
Tabel 3. 9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025	35
Tabel 3. 10 Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	37
Tabel 3. 11 Efisiensi Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	38
Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	41
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Investasi Berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2025..	42
Tabel 3.14 Capaian Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	43
Tabel 3.15 Serapan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	44
Tabel 3.16 Efisiensi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	45
Tabel 3.17 Serapan Anggaran Program Promosi Penanaman Modal.....	45
Tabel 3.18 Efisiensi Program Promosi Penanaman Modal.....	46
Tabel 3.19 Serapan Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal.....	46
Tabel 3.20 Efisiensi Program Pelayanan Penanaman Modal.....	47

Tabel 3.21 Serapan Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	47
Tabel 3.22 Efisiensi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	48
Tabel 3.23 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.....	48
Tabel 3.24 Efisiensi Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	49
Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Jabatan DPMPTSP Kota Pekalongan	3
Gambar 3.1 New SAKPORE	54
Gambar 3.2 SIAPPEM	54
Gambar 3.3 PUSAT PENA Bergerak	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi selama satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini mengalihkan fokus dari sekadar penyerapan anggaran (input) menjadi pencapaian hasil yang dirasakan masyarakat (*outcome*).

Sebagai instansi yang mampu urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu, DPMPTSP memiliki peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik yang prima. LKjIP ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan telah tercapai.

Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LKjIP Tahun 2025 memiliki urgensi khusus karena merupakan periode pamungkas dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2021–2026. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menyajikan data capaian tahunan, tetapi juga menjadi refleksi akhir atas keberhasilan sasaran jangka menengah organisasi.

Hasil evaluasi yang tertuang dalam LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan

periode 2025–2029 guna memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan daya saing Kota Pekalongan di masa depan

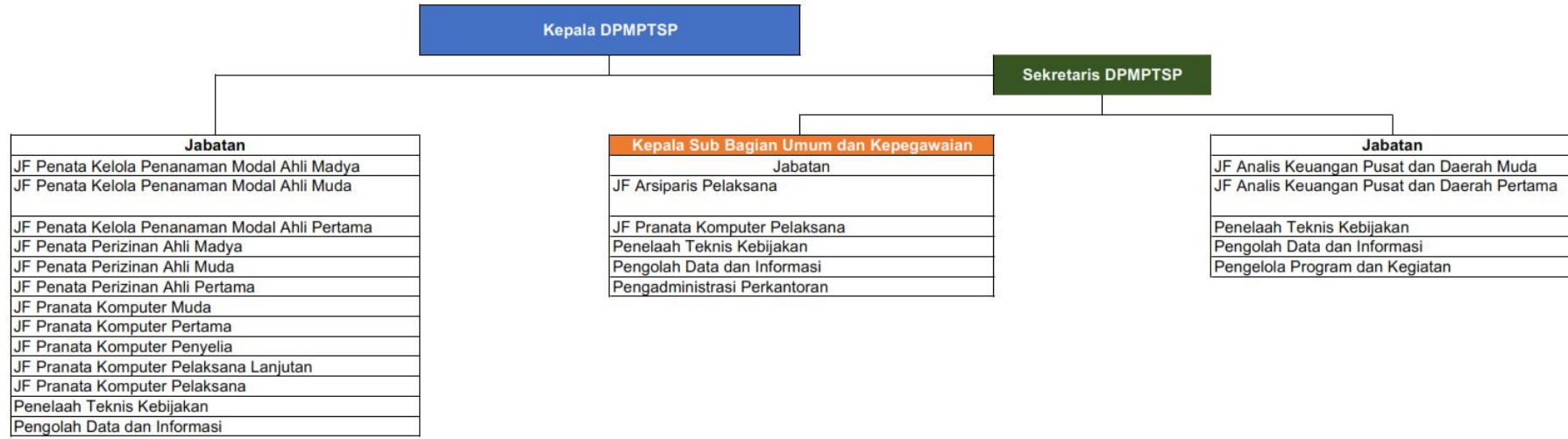
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dicabut sebagian dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, DPMPTSP memiliki tugas pokok untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD

Gambar 1. 1 Peta Jabatan DPMPTSP Kota Pekalongan



- a. DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 2. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 3. Penyelenggaraan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi Daerah.
 5. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
 9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan.
 10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya.
 11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas.
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
 3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 4. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 6. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
 7. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
 8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 9. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
 11. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- c. Pada DPMPTSP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Visi-Misi DPMPTSP Kota Pekalongan

Visi :

Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima

Misi :

1. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi Kota Pekalongan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan kerjasama;
3. Mengembangkan sistem pengendalian penanaman modal/investasi;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima;
5. Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis teknologi informasi;
6. Megembangkan kualitas dan profesionalisme SDM.

1.3 KONDISI APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana. Seluruh personel memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan publik, memfasilitasi investasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kondisi aparatur di DPMPTSP Kota Pekalongan tidak hanya difokuskan pada pelayanan internal perizinan, tetapi juga mencakup pengelolaan pelayanan terpadu yang lebih luas, antara lain:

- SDM Pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP): Penempatan personel sebagai *front office*, dan *customer service*.
- Dukungan SDM untuk Unit Kerja Khusus Imigrasi (UKK): Sebagai bentuk sinergi antarinstansi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, DPMPTSP menugaskan sejumlah tenaga pendukung untuk membantu operasional administrasi dan pelayanan pada Unit Kerja Imigrasi di Kota Pekalongan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan paspor dan keimigrasian dengan lancar.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	10	19
2	PPPK Penuh Waktu	3	0	3
3	PPPK Paruh Waktu	11	7	18
4	Tenaga Non-ASN	12	5	18
Total		35	22	57

Berdasarkan Tabel 1.1, total Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung operasional DPMPTSP Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 58 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang (70%) telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan 17 orang Tenaga Non-ASN dan 18 orang PPPK Paruh Waktu yang memegang peranan signifikan dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi, teknis lapangan, serta operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Unit Kerja Khusus (UKK) Imigrasi. Dari sisi gender, komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 36 orang (62%), sementara pegawai perempuan berjumlah 22 orang (38%).

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Golongan IV (Pembina)	4	21,05
2	Golongan III (Penata)	10	52,63
3	Golongan II (Pengatur)	5	26,32
4	Golongan I (Juru)	0	0
Total		19	100

Ditinjau dari sisi kepangkatan pada Tabel 1.2, mayoritas PNS di DPMPTSP Kota Pekalongan berada pada Golongan III (Penata) yaitu sebanyak 10 orang atau 52,63%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi di DPMPTSP didominasi oleh personil yang berada pada tingkat kematangan karier menengah, yang sangat ideal untuk menjalankan fungsi manajemen operasional dan pelayanan publik secara teknis. Selain itu, kepemilikan 4 orang pegawai di Golongan IV (21,05%) memastikan

tersedianya kader kepemimpinan yang berpengalaman dalam pengambilan keputusan strategis.

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN (PNS/PPPK)	Non-ASN	Total
1	Pascasarjana (S2)	3	0	3
2	Sarjana (S1/D4)	16	8	24
3	Diploma III (D3)	11	1	12
4	SMA / Sederajat	7	7	14
5	SMP / Sederajat	2	1	3
6	SD / Sederajat	1	0	1
Total		40	17	57

Secara umum, SDM DPMPTSP Kota Pekalongan memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat baik, di mana 68% (39 orang) merupakan lulusan pendidikan tinggi (D3 hingga S2) yang bertugas pada lini manajerial dan teknis perizinan. Adapun pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah dialokasikan khusus untuk mendukung tugas-tugas penunjang operasional kantor, seperti tenaga kebersihan (*cleaning service*), tenaga keamanan (*security*), serta pembantu operasional lainnya demi kelancaran pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Unit Kerja Khusus (UKK) Imigrasi.

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Jabatan Struktural (Eselon)	3	Kepala, Sekretaris, Kasubbag Umpeg
2	Jabatan Fungsional	10	Penata Perizinan, Penata Kelola Penanaman Modal, Pranata Komputer
3	Jabatan Pelaksana / Umum	27	Pengadministrasi, Pengolah Data, Penelaah Teknis
4	Tenaga Pendukung (Non-ASN)	17	Keamanan, Kebersihan, Tenaga Operasional MPP dan UKK
Total		57	

Berdasarkan Tabel 1.4, DPMPTSP Kota Pekalongan mengimplementasikan struktur organisasi yang ramping dengan hanya mempertahankan 3 Jabatan

Struktural. Fokus utama organisasi diletakkan pada Jabatan Fungsional (10 orang) dan Jabatan Pelaksana (27 orang) sebagai ujung tombak pelayanan perizinan dan pengelolaan data. Dukungan dari 17 orang tenaga pendukung memastikan operasional harian pada unit-unit khusus seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dapat berjalan dengan prima bagi masyarakat.

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang prima, DPMPTSP Kota Pekalongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan sarpras ini difokuskan pada tiga pilar utama: kenyamanan pengguna layanan, integrasi teknologi informasi, dan kelancaran operasional lapangan. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.5:

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Pekalongan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Station Wagon	4	Unit
2	AC Split	43	Unit
3	Sepeda Motor Dinas	11	Unit
4	Lemari Besi/Metal	14	Unit
5	Rak Kayu	1	Unit
6	Filing Cabinet Besi	20	Unit
7	Brankas	1	Unit
8	White Board	2	Unit
9	Papan Nama Instansi	2	Unit
10	Papan Pengumuman	1	Unit
11	Meja Rapat	16	Unit
12	Kursi Tamu	9	Unit
13	Bangku Tunggu	44	Unit
14	Kursi Pengunjung	12	Unit
15	Meja Komputer	20	Unit
16	Kursi Tangan	4	Unit
17	Meja Tulis	1	Unit
18	Televisi	11	Unit
19	Unit Power Supply	1	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
23	Pesawat Telepon	4	Unit
24	P.C Unit	36	Unit
25	Printer	27	Unit
26	Router	1	Unit
27	Server	15	Unit
28	Hub	3	Unit
29	Kursi Putar	50	Unit
30	Note Book	10	Unit
31	Lemari Kaca	1	Unit
32	Alat Pemadam/Portable	11	Unit
33	LCD Proyektor	1	Unit
34	Scanner	3	Unit
35	Lemari Kayu	10	Unit
36	Rak Besi	1	Unit
37	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
38	Meja Resepsionis	8	Unit
39	Dispenser	7	Unit
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit
43	Kursi Rapat	44	Unit
44	Microphone	3	Unit
45	Mesin Absensi	1	Unit
46	AC Window	1	Unit
47	Sound System	3	Unit
48	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	9	Unit
49	Lemari Es	2	Unit
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
52	Mesin Antrian	1	Unit
53	CCTV	1	Unit
54	Meja kerja kayu	25	Unit
55	Partisi	17	Unit
56	Portable Generating Set	18	Unit
57	Mesin Fotocopy Electronic	1	Unit
58	Mesin Laminating	2	Unit
59	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
60	Kursi Besi/Metal	16	Unit
61	Meja 1/2 Biro	5	Unit
62	Kursi Lipat	30	Unit
63	kipas angin	8	Unit
64	Air Curtain	4	Unit
65	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	Unit
66	Meja Tamu Biasa	1	Unit
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit
68	Camera Digital	3	Unit
69	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Unit
71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	Unit
72	Trolley barang stainless 300kg	1	Unit

1.5 ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa arah kebijakan DPMPTSP Kota Pekalongan tetap relevan dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan investasi dan perizinan, DPMPTSP dihadapkan pada perpaduan antara potensi besar daerah, tantangan lingkungan geografis, hingga perubahan regulasi di tingkat nasional.

Kota Pekalongan memiliki modalitas kuat sebagai Kota Batik Dunia dengan ekosistem UMKM yang tumbuh subur dan posisi strategis di jalur Pantura. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta inovasi digital seperti New SAKPORE menjadi katalisator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang modern. Namun, di sisi lain, organisasi masih menghadapi permasalahan mendasar seperti fluktuasi pertumbuhan investasi, rendahnya kepatuhan penyampaian LKPM, serta keterbatasan regulasi insentif yang perlu segera diperbarui agar tetap relevan dengan sistem OSS-RBA.

Secara lebih luas, isu lingkungan hidup seperti ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah menjadi variabel penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang harus diintegrasikan dengan rencana penanaman modal. Selain itu, tuntutan global terhadap *Green Economy* dan hilirisasi Sumber Daya Alam sebagaimana tertuang dalam arah RPJMN 2025–2029, mengharuskan DPMPTSP untuk melakukan transformasi layanan yang lebih cepat, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan tersebut, maka dirumuskan beberapa isu strategis utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan iklim investasi kondusif, inklusif, dan berdaya saing dengan tetap menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Optimalisasi regulasi dan fasilitasi investasi untuk mendukung hilirisasi, green economy, dan OSS-RBA ;
3. Peningkatan kesadaran dan fasilitasi legalitas UMKM melalui percepatan penerbitan NIB untuk memperkuat daya saing dan akses pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Pekalongan.

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			Visi Kepala Daerah

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal			Misi Kepala Daerah
Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat			Tujuan Kota
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			Sasaran Kota
Meningkatkan Investasi atau Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi	2%	Tujuan DPMPTSP
Meningkatnya Investasi atau Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi di Kabupaten / Kota	216,78 Milyar Rupiah	Sasaran DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Program
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif Dibidang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	Kegiatan
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Sub Kegiatan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen	Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Sub Kegiatan
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Program
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Sub Kegiatan
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 Dokumen	Program
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 bulan	Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Sub Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3025 Pelaku Usaha	Sub Kegiatan
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	Sub Kegiatan
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	Sub Kegiatan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 Milyar Rupiah	Program
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 Perusahaan	Kegiatan
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	Sub Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	127 Pelaku Usaha	Sub Kegiatan
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Program
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Sub Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government			Misi Kepala Daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Tujuan Kota
Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)			Sasaran Kota
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,37 Indeks	Tujuan DPMPTSP
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,85 Indeks	Sasaran DPMPTSP
Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	Program
	2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Program
	3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	Program
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Sub Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Sub Kegiatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Sub Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Sub Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Sub Kegiatan
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025	Keterangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Sub Kegiatan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama DPMPTSP Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 2 Target Sasaran Kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar	Nilai investasi sampai dengan tahun n	DPMPTSP

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Target Sasaran Kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74	75,5	77	77,6	77,85	78,1
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar	196,35	200,28	204,28	212,54	216,78	221,12

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan :				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,91 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2	Meningkatkan Investasi atau Penanaman Modal	Pertumbuhan Investasi	2 Persen	Formulasi : Investasi sampai dengan tahun N - Investasi sampai dengan tahun N-1 / investasi sampai dengan tahun N-1 * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPTSP
Sasaran :				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,85 Indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	212,54 Milyar	Formulasi : Nilai investasi sampai dengan tahun n Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPTSP

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.947.155.000	APBD-P
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp42.854.000	APBD-P
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp28.930.000	APBD-P
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp733.874.000	APBD-P
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp168.340.000	APBD-P
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp103.368.000	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengembal amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,85	78,00	100,19	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Investasi Di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	216,78	2031,19	936,98	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indikator Nilai SAKIP mencapai realisasi 78,00 dari target 77,85 (capaian 100,19%).

2. Nilai Investasi (Akumulasi) Pencapaian Nilai Investasi pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat luar biasa dengan angka akumulasi mencapai Rp2.031,19 Miliar atau sebesar 936,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp216,78 Miliar.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,05	77,60	77,90	78,00	▲
2	Meningkatnya Investasi Di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	570,79	1208,61	1446,65	2031,19	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Berdasarkan perbandingan data di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis mengenai pertumbuhan kinerja DPMPTSP :

1. Keberlanjutan Akuntabilitas (Nilai SAKIP)

Terjadi peningkatan kualitas tata kelola secara konsisten dari angka 76,05 pada tahun 2022 menjadi 78,00 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, terus mengalami perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju predikat yang lebih tinggi.

2. Akselerasi Realisasi Investasi

Indikator investasi menunjukkan lompatan yang sangat signifikan. Dari akumulasi sebesar Rp570,79 Miliar di tahun 2022, meningkat menjadi Rp2.031,19 Miliar pada akhir tahun 2025. Kenaikan tajam antara tahun 2024 ke 2025 dipicu oleh masuknya realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) atas realisasi renovasi gedung senilai Rp365 Miliar serta efektivitas pelayanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik. Tren kenaikan ini membuktikan bahwa iklim

investasi di Kota Pekalongan semakin kondusif dan kepercayaan pelaku usaha (baik PMDN maupun PMA) terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	78,00	78,10	99,87	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Investasi Di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	2031,19	221,12	918,59	Sangat Berhasil

Berdasarkan data di atas, efektivitas kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kesiapan Menuju Target SAKIP Ideal

Dengan realisasi 78,00, capaian akuntabilitas organisasi telah mencapai 99,87% dari target akhir tahun 2026. Selisih tipis sebesar 0,10 poin menunjukkan bahwa pada tahun terakhir Renstra, fokus organisasi adalah melakukan penyempurnaan pada aspek implementasi manajemen kinerja untuk melampaui target yang ditetapkan.

2. Melampaui Target Investasi Secara Signifikan

Realisasi akumulasi investasi sebesar Rp2.031,19 Miliar telah melampaui target akhir Renstra sebesar Rp221,12 Miliar (mencapai 918,59%). Tingginya capaian ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, serta dukungan penuh dari fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberhasilan menarik investasi PMA besar pada tahun 2025 menjadi faktor pembeda yang mempercepat pencapaian target jangka menengah lebih awal dari waktu yang direncanakan.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi / Nasional / Internasional	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	BB	B	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Investasi Di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	2031,19	N/A	N/A	

Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Pekalongan berhasil meraih predikat BB dengan kategori "Sangat Baik". Jika dikomparasikan dengan target nasional yang berada pada predikat B dengan kategori "Baik", hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP telah melampaui standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan secara nasional. Sementara itu, untuk indikator Nilai Investasi Sampai Dengan Tahun Rencana, perbandingan pada level provinsi maupun nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan indikator tersebut tidak tersedia atau tidak bersifat paralel untuk dikomparasikan secara langsung.

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Capaian Kinerja Tujuan mencerminkan dampak akhir dari seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Pekalongan. Berikut adalah realisasi kinerja tujuan pada tahun 2025:

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,37	93,01	106,63	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Investasi Atau Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi	persen	2,00	40,40	2020,00	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Realisasi IKM mencapai 93,01, melampaui target 87,37. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha merasa sangat puas dengan transformasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Peningkatan ini merupakan hasil dari penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, serta keramahan petugas (SDM) yang didukung oleh sarana prasarana yang representatif.

2. Akselerasi Pertumbuhan Investasi

Indikator Pertumbuhan Investasi mencatatkan lompatan drastis sebesar 40,40%, jauh di atas target moderat sebesar 2,00%. Pertumbuhan yang mencapai 2.020% dari target ini dipicu oleh masuknya modal besar dari sektor PMA melalui renovasi gedung senilai Rp365 Miliar pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa strategi promosi dan pendampingan investasi yang dilakukan telah berhasil menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	74,00	Nilai	77,60	77,90	77,85	78,00	100,19	78,10

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP DPMPTSP memperoleh nilai 78.00 atau predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DPMPTSP sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP DPMPTSP ini sesuai dengan target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		"Sangat Baik"	

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi akuntabilitas kinerja DPMPTSP di tingkat pemerintah daerah, perlu dilakukan perbandingan dengan capaian Pemerintah Kota Pekalongan dengan OPD lainnya. Hal ini bertujuan untuk memetakan klaster performa serta mengidentifikasi ruang perbaikan (gap) antarsatuan kerja. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan nilai 73,28 (Sangat baik). Sedangkan daftar capaian nilai SAKIP seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	OPD	Nilai 2025 Evaluator	Kategori
1	Bapperida	88,70	A
2	DLH	85,95	A
3	Dindagkop-UKM	85,70	A
4	Inspektorat Daerah	84,75	A
5	BPKAD	84,60	A
6	BKPSDM	84,00	A
7	DPMPPA	83,55	A

No.	OPD	Nilai 2025 Evaluator	Kategori
8	Dinkominfo	83,50	A
9	DKP	83,27	A
10	Dinkes	83,25	A
11	DPUPR	83,05	A
12	Dindukcapil	82,95	A
13	Setda	81,85	A
14	Dindik	78,50	BB
15	Dinparbudpora	78,15	BB
16	DPMPTSP	78,00	BB
17	Kec. Selatan	77,15	BB
18	Dinhub	77,00	BB
19	Kec. Utara	76,65	BB
20	Kec. Barat	76,50	BB
21	Kec. Timur	76,45	BB
22	Dinperpa	76,40	BB
23	Dinsos P2KB	76,35	BB
24	Dinarpus	76,10	BB
25	BPBD	76,00	BB
26	Satpol P3KP	75,50	BB
27	Dinperinaker	75,45	BB
28	Set DPRD	75,00	BB
29	Dinperkim	74,80	BB
30	Bakesbangpol	73,75	BB

Keberhasilan DPMPTSP dalam mencapai target nilai SAKIP ini mencerminkan komitmen seluruh lini dalam mengimplementasikan manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan yang akuntabel. Hal ini didukung oleh penguatan sistem monitoring internal dan penyelarasan program kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Capaian nilai SAKIP DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 yang mencapai predikat "Sangat Baik" (BB) tidak terlepas dari beberapa faktor kunci pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan: Adanya keterlibatan langsung kepala dinas dalam setiap tahapan siklus SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil.
2. Sinergi Antarbidang: Koordinasi yang solid dalam pengumpulan data kinerja dan bukti dukung (*evidence*) secara tepat waktu.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi: Optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung kinerja yang memudahkan pemantauan target secara real-time.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia: Adanya pemahaman yang baik dari pengelola kinerja mengenai indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 10 Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.965.000,00	45.503.000,00	45.317.200,00	Menjamin tersedianya dokumen perencanaan (Renja, RKA) dan pelaporan (LKj, SAKIP) yang akuntabel dan tepat waktu sebagai fondasi utama penilaian SAKIP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.676.895.000,00	2.659.682.000,00	2.192.832.207,00	Memastikan kelancaran gaji, tunjangan, dan penatausahaan keuangan yang tertib, sehingga mendukung aspek akuntabilitas keuangan dalam integrasi SAKIP.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.650.000,00	-	-	Anggaran pengadaan pakaian dinas ditiadakan karena efisiensi dampak pembatalan Karnaval Batik, menunjukkan komitmen pada penghematan anggaran tanpa mengurangi kinerja pegawai.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.540.000,00	204.620.000,00	203.655.225,00	Ketersediaan ATK, peralatan rumah tangga, dan biaya perjalanan dinas memastikan operasional harian kantor berjalan optimal dalam mendukung target kerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.198.000,00	833.660.000,00	783.158.824,00	Menjamin ketersediaan fasilitas vital (listrik, internet) dan peran jasa non-ASN dalam mendukung input data kinerja serta layanan publik digital.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.560.000,00	203.690.000,00	189.003.268,00	Pemeliharaan gedung, sarpras, dan kendaraan dinas memastikan aset daerah tetap berfungsi baik untuk mendukung mobilitas pencapaian indikator kinerja

Tabel 3. 11 Efisiensi Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja	Realisasi: 99,59% (Hemat 0,41%).	Tim penyusun yang terdiri dari 2-3 orang mampu mengoordinasikan pengumpulan data kinerja dari seluruh bidang melalui grup koordinasi digital.	Durasi reviu dokumen turun secara signifikan karena proses asistensi dilakukan secara paralel menggunakan media daring sebelum finalisasi fisik.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi: 82,45% (Hemat 17,55%). - Faktor Utama: Terdapat efisiensi besar pada belanja gaji dan tunjangan karena posisi Kepala Dinas dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas) selama periode Februari–Desember, sehingga tidak ada pembayaran gaji pokok Kepala Dinas pada periode tersebut. - Penataan administrasi juga dilakukan secara lebih selektif.	Beban kerja bendahara gaji menjadi lebih ringan dalam hal verifikasi dokumen penggajian pimpinan, sehingga fokus SDM beralih pada percepatan rekonsiliasi laporan keuangan tahunan.	Proses pencairan anggaran belanja pegawai menjadi lebih cepat dan presisi karena berkurangnya variabel komponen gaji pimpinan definitif yang harus dihitung ulang setiap bulannya.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Realisasi: 0% (Hemat 100%). - Anggaran pengadaan pakaian dinas tidak terserap karena kebijakan efisiensi dampak pembatalan karnaval batik.	SDM yang tadinya diplot untuk panitia teknis karnaval dialihkan untuk fokus pada penginputan data Anjab-ABK dan pemutakhiran data pegawai di sistem.	Menghemat waktu persiapan lapangan (rata-rata 2-3 minggu) yang kemudian dialokasikan untuk percepatan administrasi internal.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Realisasi: 99,53% (Hemat 0,47%). - Pengendalian ketat terhadap penggunaan ATK dan perjalanan dinas yang hanya dilakukan untuk hal bersifat mendesak.	Satu staf administrasi umum mampu melayani kebutuhan logistik seluruh kantor berkat sistem inventarisasi yang lebih tertata dan berbasis permintaan digital.	Waktu perjalanan dinas terpengkas karena koordinasi yang sifatnya konsultatif dialihkan melalui telepon atau media daring.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	- Realisasi: 93,94% (Hemat 6,06%). - Optimalisasi biaya listrik dan internet melalui pengaturan jadwal penggunaan fasilitas kantor yang lebih disiplin.	Jasa non-ASN difokuskan pada penguatan dukungan teknis layanan publik sehingga produktivitas per orang meningkat dalam melayani pemohon izin.	Ketersediaan internet yang stabil memangkas waktu tunggu pengiriman laporan dari yang sebelumnya dilakukan secara fisik ke instansi lain.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	- Realisasi: 92,79% (Hemat 7,21%). - Penghematan berasal dari skema pemeliharaan preventif (pencegahan) pada sarpras dan kendaraan sehingga mencegah kerusakan berat yang mahal.	Pengawasan pemeliharaan dilakukan secara mandiri oleh tim internal sehingga tidak memerlukan banyak pihak ketiga untuk supervisi rutin.	Waktu perbaikan aset terpangkas karena adanya jadwal pemeliharaan berkala, sehingga aset (seperti kendaraan/komputer) selalu siap digunakan kapan saja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 telah menunjukkan prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin utama sebagai berikut:

- **Optimalisasi Anggaran Melalui Kebijakan Strategis:** Instansi berhasil melakukan penghematan anggaran yang signifikan, terutama pada kegiatan Administrasi Keuangan sebesar 17,55% yang disebabkan oleh faktor jabatan Plt Kepala Dinas selama 11 bulan. Selain itu, efisiensi mutlak (100%) pada Administrasi Kepegawaian dilakukan dengan meniadakan pengadaan pakaian dinas akibat pembatalan kegiatan karnaval.
- **Peningkatan Produktivitas SDM:** Meskipun terdapat beberapa agenda yang ditiadakan atau jabatan yang kosong, produktivitas SDM tetap terjaga bahkan meningkat. Fokus pegawai dialihkan pada percepatan administrasi internal,

penataan arsip digital, dan koordinasi yang lebih masif melalui pemanfaatan media daring (WhatsApp dan telepon).

- **Akselerasi Waktu Kerja Melalui Digitalisasi:** Penggunaan checklist evaluasi dan reviu dokumen secara digital terbukti memangkas waktu asistensi dan koordinasi. Hal ini selaras dengan rekomendasi evaluator untuk memperkuat monitoring secara rutin dan berkala serta penyempurnaan pohon kinerja guna memastikan proses bisnis berjalan lebih ramping dan cepat.
- **Keberlanjutan Sarana Prasarana:** Melalui pemeliharaan preventif dan pengelolaan jasa penunjang yang selektif, instansi mampu menjaga ketersediaan fasilitas kerja yang prima dengan biaya yang tetap terkendali.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi bukan sekadar sisa anggaran yang tidak terserap, melainkan hasil dari manajemen kerja yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika organisasi. Capaian ini menjadi modal penting bagi DPMPTSP untuk terus mempertahankan dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

SASARAN 2 : Meningkatkan Investasi di Kabupaten/Kota

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian investasi, berikut disajikan perbandingan realisasi investasi dari tahun ke tahun hingga proyeksi terhadap target akhir Renstra::

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	196,35	Miliar Rupiah	1208,61	1446,65	216,78	2031,19	936,98	221,12

Tabel 3.13 Rincian Realisasi Investasi Berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2025

Kategori Usaha	Target (Rp Milliar)	Realisasi (Rp Milliar)	Capaian (%)
Non-UMK	250,00	567,70	227,08
UMK	-	16,84	-
Total	250,00	584,54	227,08

Analisis mendalam terhadap lonjakan capaian ini adalah sebagai berikut:

- Sumber Target Non-UMK: Target sebesar Rp250,00 Miliar pada kategori Non-UMK merupakan target "*top-down*" yang ditetapkan secara berjenjang. Target ini diturunkan dari target nasional melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, termasuk Kota Pekalongan.
- Klasifikasi Realisasi Non-UMK: Realisasi pada sektor Non-UMK sebesar Rp567,70 Miliar bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha secara Triwulanan. Di dalamnya mencakup investasi besar, termasuk dari PMA senilai Rp365 Miliar.
- Kontribusi Sektor UMK: Meskipun tidak dibebankan target spesifik dari pusat, DPMPTSP tetap memantau realisasi investasi pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tercatat realisasi sebesar Rp16,84 Miliar yang dihimpun melalui LKPM dengan periode pelaporan Semesteran.
- Dampak Penguatan Pelayanan: Keberhasilan menarik dan mengawal investasi PMA dalam skala besar ini merupakan dampak positif dari kemudahan berusaha melalui sistem OSS-RBA serta pendampingan intensif yang dilakukan oleh tim DPMPTSP kepada para pelaku usaha dalam penyusunan LKPM.

Berikut ini data rincian capaian realisasi investasi PMA dan PMDN dari Non UMK se Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 3.14 Capaian Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Persentase capaian (%)
1	Kabupaten Banjarnegara	400.000	510.583,43	127,65
2	Kabupaten Banyumas	1.400.000	1.887.423,65	134,82

No	Kabupaten / Kota	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Persentase capaian (%)
3	Kabupaten Batang	6.700.000	6.727.957,78	100,42
4	Kabupaten Blora	1.200.000	1.636.820,78	136,40
5	Kabupaten Boyolali	2.300.000	2.358.128,19	102,53
6	Kabupaten Brebes	2.100.000	2.391.012,21	113,86
7	Kabupaten Cilacap	1.300.000	1.367.337,59	105,18
8	Kabupaten Demak	7.730.000	9.065.587,15	117,28
9	Kabupaten Grobogan	1.500.000	2.269.156,39	151,28
10	Kabupaten Jepara	1.900.000	1.950.244,87	102,64
11	Kabupaten Karanganyar	2.000.000	2.618.837,59	130,94
12	Kabupaten Kebumen	150.000	159.021,78	106,01
13	Kabupaten Kendal	15.700.000	15.857.395,88	101,00
14	Kabupaten Klaten	700.000	718.179,51	102,60
15	Kabupaten Kudus	1.000.000	1.040.368,05	104,04
16	Kabupaten Magelang	1.000.000	1.117.784,16	111,78
17	Kabupaten Pati	1.400.000	1.412.833,52	100,92
18	Kabupaten Pekalongan	2.000.000	2.106.970,68	105,35
19	Kabupaten Pemalang	1.400.000	2.883.051,87	205,93
20	Kabupaten Purbalingga	400.000	448.581,97	112,15
21	Kabupaten Purworejo	150.000	217.039,11	144,69
22	Kabupaten Rembang	710.000	868.060,68	122,26
23	Kabupaten Semarang	4.000.000	4.367.292,75	109,18
24	Kabupaten Sragen	1.000.000	1.506.933,45	150,69
25	Kabupaten Sukoharjo	1.500.000	2.219.242,46	147,95
26	Kabupaten Tegal	3.500.000	3.898.712,70	111,39
27	Kabupaten Temanggung	400.000	450.359,52	112,59
28	Kabupaten Wonogiri	1.000.000	1.521.254,05	152,13
29	Kabupaten Wonosobo	250.000	303.592,35	121,44
30	Kota Magelang	190.000	192.965,28	101,56
31	Kota Pekalongan	250.000	567.699,73	227,08
32	Kota Salatiga	800.000	1.123.128,47	140,39
33	Kota Semarang	11.000.000	11.147.445,81	101,34

No	Kabupaten / Kota	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Persentase capaian (%)
34	Kota Surakarta	700.000	797.622,69	113,95
35	Kota Tegal	600.000	791.669,36	131,94
	Jawa Tengah	78.330.000	88.500.295	112,98

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja sasaran meningkatnya investasi di kabupaten/kota:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tabel 3.15 Serapan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.024.000,00	16.024.000,00	15.644.000,00	Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mendukung iklim investasi yang kondusif
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.830.000,00	26.830.000,00	26.379.115,00	Penyusunan Peta Potensi investasi yang dimaksudkan untuk memudahkan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pekalongan

Tabel 3.16 Efisiensi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	97,63% (Sisa Rp380.000)	Optimalisasi Tim Teknis internal dalam penyusunan draf kebijakan.	Selesai tepat waktu sesuai target legislasi daerah.
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	98,32% (Sisa Rp450.885)	Menggunakan tenaga ahli lokal yang didampingi personil bidang terkait.	Diselesaikan sebelum periode promosi utama dimulai.

Kesimpulan Efisiensi:

- Efisiensi Anggaran: Terjadi penghematan sisa belanja sebesar Rp380.000 pada kegiatan pemberian insentif (capaian 97,63%) dan Rp450.885 pada pembuatan peta potensi (capaian 98,32%).
- Efisiensi SDM: Pengelolaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tim Teknis internal dalam penyusunan draf kebijakan, serta melibatkan tenaga ahli lokal yang didampingi oleh personil internal.
- Efisiensi Waktu: Seluruh program diselesaikan tepat waktu sesuai target.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Tabel 3.17 Serapan Anggaran Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.930.000,00	28.930.000,00	28.730.000,00	Memperluas informasi dan meningkatkan kepedulian calon investor untuk berinvestasi di Kota Pekanbaru

Tabel 3.18 Efisiensi Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99,31% (Sisa Rp200.000)	Kolaborasi tim promosi dengan pelaku usaha melalui FGD kemitraan.	Pelaksanaan event promosi sesuai kalender tahunan.

Kesimpulan Efisiensi:

- Efisiensi Anggaran: Realisasi anggaran mencapai 99,31%, dengan sisa efisiensi belanja sebesar Rp200.000 dari pagu yang ditetapkan.
- Efisiensi SDM: Dilakukan melalui kolaborasi aktif antara tim promosi internal dengan pelaku usaha melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) kemitraan. Penggunaan metode kemitraan ini memastikan pesan promosi tepat sasaran dengan melibatkan pemangku kepentingan secara langsung.
- Efisiensi Waktu: Seluruh rangkaian *event* promosi dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan kalender tahunan yang telah direncanakan, sehingga momentum penawaran potensi daerah tetap terjaga

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3.19 Serapan Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	765.794.000,00	733.874.000,00	729.414.548,00	Kegiatan ini merupakan pintu masuk pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kota Pekalongan melalui pelayanan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha

Tabel 3.20 Efisiensi Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99,39% (Sisa Rp4.459.452)	Efisiensi melalui integrasi layanan di gedung MPP maupun PUSAT PENA Bergerak oleh personil DPMPTSP.	Percepatan durasi layanan melalui sistem satu pintu.

Kesimpulan efisiensi:

- Efisiensi Anggaran: Realisasi anggaran mencapai 99,39%, dengan penghematan sisa belanja sebesar Rp4.459.452 dari pagu yang ditetapkan.
- Efisiensi SDM: Pencapaian ini didorong oleh integrasi layanan yang solid di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) serta inovasi layanan jemput bola melalui PUSAT PENA Bergerak oleh personil DPMPTSP. Kekuatan personil sebanyak 57 orang memastikan seluruh kanal layanan, baik statis maupun dinamis, dapat terlayani secara optimal.
- Efisiensi Waktu: Terjadi percepatan durasi layanan yang signifikan melalui penerapan sistem satu pintu, yang memangkas birokrasi dan memberikan kepastian waktu bagi pemohon perizinan.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 3.21 Serapan Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	168.510.000,00	168.340.000,00	162.929.232,00	Mendorong pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga realisasi investasi yang merupakan IKU DPMPTSP tercatat.

Tabel 3.22 Efisiensi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	96,79% (Sisa Rp5.410.768)	Tim Pengendalian melakukan pengawasan lapangan secara kolektif per zonasi.	Kepatuhan pelaporan LKPM terpantau secara periodik.

Kesimpulan efisiensi:

- Efisiensi Anggaran: Realisasi anggaran tercapai sebesar 96,79%, dengan penghematan atau sisa belanja sebesar Rp5.410.768 dari total pagu yang dialokasikan.
- Efisiensi SDM: Tim Pengendalian melakukan pengawasan lapangan secara kolektif dengan pembagian per zonasi wilayah, sehingga penggunaan personil menjadi lebih terarah dan efisien. Selain itu, dilakukan pula kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam pelaporan.
- Efisiensi Waktu: Kepatuhan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat terpantau secara periodik, yang memudahkan organisasi dalam melakukan evaluasi realisasi investasi secara *real-time*.

5. Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Tabel 3.23 Serapan Anggaran Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Refocusing) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.368.000,00	103.368.000,00	99.543.640,00	Dukungan data dan informasi penanaman modal sehingga bisa dimanfaatkan oleh stakeholder

Tabel 3.24 Efisiensi Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96,30% (Sisa Rp3.824.360)	Tim Data dan Informasi melakukan pemeliharaan mandiri pada Website dan Media Sosial.	Pengelolaan data dilakukan secara real-time.

- Efisiensi Anggaran: Realisasi anggaran tercapai sebesar 96,30%, dengan sisa efisiensi sebesar Rp3.824.360 dari pagu perubahan yang ditetapkan.
- Efisiensi SDM: Pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara mandiri oleh Tim Data dan Informasi melalui pemeliharaan *website* dan media sosial secara internal. Hal ini meminimalkan ketergantungan pada pihak ketiga dan mengoptimalkan kompetensi digital 57 personil yang dimiliki DPMPTSP.
- Efisiensi Waktu: Pengelolaan data telah dilakukan secara real-time, sehingga arus informasi mengenai perkembangan investasi dan perizinan dapat diakses secara cepat dan akurat untuk keperluan pengambilan kebijakan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai DPMPTSP Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.024.521.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.476.607.259,- atau sebesar 89,10%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp2.400.607.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.319.539.852,- . atau sebesar 96,62%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.024.521.000	4.476.607.259	89,10
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.947.155.000	3.413.966.724	86,49
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.503.000	45.317.200	99,59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.377.000	4.376.000	99,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.002.000	2.001.800	99,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.124.000	38.939.400	99,53
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.659.682.000	2.192.832.207	82,45
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.914.000	2.157.067.407	82,21
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.950.000	34.950.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	818.000	814.800	99,61
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	N/A
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	N/A
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.620.000	203.655.225	99,53
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.830.000	3.824.000	99,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.228.000	43.637.001	98,66
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.560.000	6.551.000	99,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.150.000	45.140.000	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.150.000	30.934.500	99,31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000	1.720.000	93,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.872.000	71.848.724	99,97

No	Urusan/Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.660.000	783.158.824	93,94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000	3.560.000	81,84
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.462.000	350.608.856	89,56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.848.000	428.989.968	97,98
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.690.000	189.003.268	92,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.650.000	95.034.068	94,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.900.000	41.746.000	99,63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.140.000	52.223.200	85,42
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	42.854.000	42.023.115	98,06
7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.024.000	15.644.000	97,63
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16.024.000	15.644.000	97,63
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.830.000	26.379.115	98,32
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.830.000	26.379.115	98,32

No	Urusan/Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	28.930.000	28.730.000	99,31
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.930.000	28.730.000	99,31
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.930.000	28.730.000	99,31
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	733.874.000	729.414.548	99,39
10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	733.874.000	729.414.548	99,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.860.000	9.860.000	100,00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	455.764.000	452.394.806	99,26
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	49.260.000	49.260.000	100,00
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	218.990.000	217.899.742	99,50

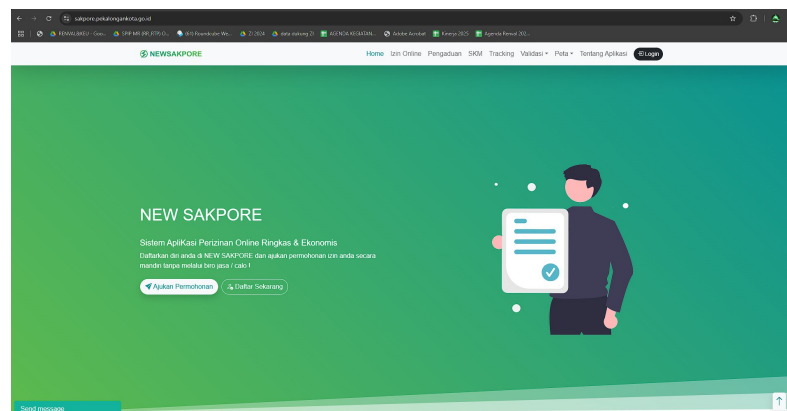
No	Urusan/Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	168.340.000	162.929.232	96,79
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	168.340.000	162.929.232	96,79
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	47.260.000	43.659.800	92,38
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	77.110.000	75.300.432	97,65
	Pengawasan Penanaman Modal	43.970.000	43.969.000	100,00
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	103.368.000	99.543.640	96,30
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.368.000	99.543.640	96,30
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.368.000	99.543.640	96,30

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Pada tahun 2025, DPMPTSP Kota Pekalongan berhasil meraih prestasi antara lain predikat “Baik” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan predikat “Baik” pada Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

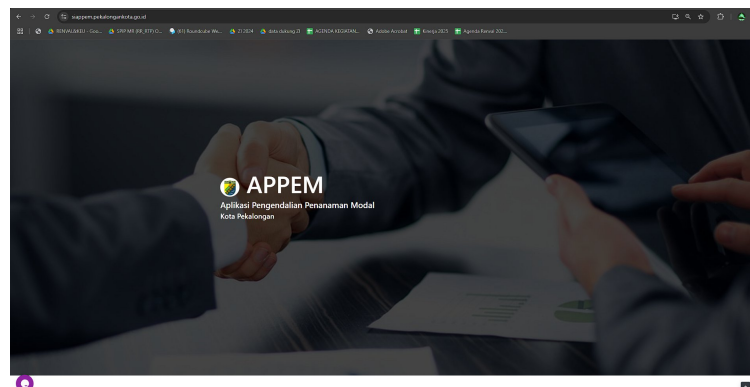
3.5 INOVASI

1. New SAKPORE, Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis adalah inovasi DPMPTSP Kota Pekalongan untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan. Dengan adanya New SAKPORE pemohon tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP Kota Pekalongan untuk mengajukan permohonan izin. New SAKPORE telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan fitur *tracking* izin yang diajukan.



Gambar 3.1 New SAKPORE

2. SIAPPEM, Sistem Informasi Aplikasi Pengendalian dan Penanaman Modal yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Pekalongan dengan memanfaatkan teknologi informasi. SIAPPEM digunakan untuk mengelola Penanaman Modal / Investasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terintegrasi dan terpadu dengan stakeholder terkait. Fitur yang ada pada Aplikasi Pengendalian Penanaman Modal (SIAPPEM) antara lain promosi investasi, informasi publik, pelaporan kegiatan PM,



Gambar 3.2 SIAPPEM

3. PUSAT PENA atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Bergerak dari DPMPTSP Kota Pekalongan merupakan inovasi yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.



Gambar 3.3 PUSAT PENA Bergerak

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya membangun *good governance* dan *result oriented government*. Dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep manajemen berbasis kinerja maka pembangunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat diselenggarakan secara konseptual.

Permasalahan pada tahun 2025 adalah upaya yang sudah dilakukan DPMPTSP untuk terus melakukan pengembangan investasi adalah dengan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pelayanan investasi.

LKjIP DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menunjukkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara konseptual, dengan pengukuran tingkat capaian kinerja seperti yang sudah diuraikan. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja pada Tahun 2025 selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan. Akhir kata semoga LKjIP DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat berguna bagi DPMP-PTSP sendiri dalam menilai kinerjanya serta guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Pekalongan, 24 Februari 2026
KEPALA DPMPTSP KOTA PEKALONGAN



ADE SUANGKAT, S.E
NIP. 19700616 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF KARYADI, S.Sos.**

Jabatan : **Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 3 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan**



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala DPMPSTSP
Kota Pekalongan**



**ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 19711017 199903 1 007**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,37	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Investasi atau penanaman modal	Pertumbuhan investasi	2%	Formulasi : Investasi sampai dengan tahun N - Investasi sampai dengan tahun N-1 / investasi sampai dengan tahun N-1 * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPTSP
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,85	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten / Kota	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	216,78	Formulasi : Nilai investasi sampai dengan tahun n Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPTSP

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.947.155.000,00	APBD-P
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 42.854.000,00	APBD-P
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 28.930.000,00	APBD-P
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 733.874.000,00	APBD-P
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 168.340.000,00	APBD-P
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 103.368.000,00	APBD-P

Pekalongan, 3 Oktober 2025

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 19711017 199903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	74,00	74,00	75,50	77,00	77,60	77,85	78,10	Inspektorat Daerah	DPMTSP
2	Meningkatnya investasi di kabupaten/kota	Nilai investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	Nilai investasi Tahun N Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	196,35	196,35	200,28	204,28	212,54	216,78	221,12	DPMTSP	DPMTSP

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan



BENO HERITRIONO, S.H., M.Si.
NIP. 19650118 198903 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang : Dalam rangka menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra OPD) dengan dokumen perencanaan tahunan, maka diperlukan penyusunan dokumen Renja OPD tahun 2027 serta Perubahan Renja tahun 2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD serta mendukung pencapaian target RPJMD.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Menyusun dokumen perencanaan OPD yang selaras dengan arah pembangunan daerah.
2. Tujuan :
 - a. Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan 2026 sesuai dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan.
 - b. Tersusunnya Dokumen Renja 2027 sebagai rencana kerja tahunan

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp 4.198.000,-

E. Volume Kegiatan : 2 Dokumen

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

2. Penjelasan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah pada DPMPTSP mendukung misi “Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal” dengan menghadirkan dokumen Renja yang terarah pada penguatan iklim investasi, kemudahan perizinan, dan fasilitasi penanaman modal yang memanfaatkan potensi unggulan daerah, sehingga pembangunan ekonomi lokal dapat tumbuh lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan
- G. Jenis Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan, rapat koordinasi, dan input data perencanaan
- H. Indikator Kinerja Kegiatan
1. Input / Masukan : Rp 4.198.000,-
 2. Output / Keluaran : Dokumen Perubahan Renja 2026 dan Renja 2027
 3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah
- I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan
1. Koordinasi internal, pengumpulan data capaian, analisis isu strategis Koordinasi dengan BAPPERIDA;
 2. Penyusunan & penyempurnaan draf Renja 2027 & Renja Perubahan 2026 sesuai arahan BAPPERIDA Penginputan pada Aplikasi SIPD-RI;
 3. Input data, penyesuaian, & pengunggahan draf ke SIPD-RI secara bertahap;
 4. Finalisasi & penetapan dokumen Renja 2027 & Renja Perubahan 2026
- J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Agustus 2026
- Teknis Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi internal, pengumpulan data capaian, analisis isu strategis												
2	Penyusunan & penyempurnaan draf Renja 2027 & Renja Perubahan 2026 sesuai arahan BAPPERIDA												
3	Input data, penyesuaian, & pengunggahan draf ke SIPD-RI secara bertahap												
4	Finalisasi & penetapan dokumen Renja 2027 & Renja Perubahan 2026												

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD Yang Terkait : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang Terkait : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md

NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	: Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

A. Latar Belakang : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Penyusunan RKA-SKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Renja, RKPD, dan KUA-PPAS), sehingga diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan BAPPERIDA dan TAPD. Melalui sub kegiatan ini, diharapkan RKA-SKPD yang disusun oleh DPMPTSP dapat mendukung prioritas pembangunan daerah serta memastikan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Menyusun dokumen RKA-SKPD secara tepat, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan daerah.
2. Tujuan :
 - c. Menghasilkan dokumen RKA-SKPD yang sesuai dengan pagu indikatif dan definitif.
 - d. Menjamin konsistensi perencanaan dengan penganggaran;
 - e. Menjadi dasar dalam penyusunan DPA SKPD

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp 1.271.000,-

E. Volume Kegiatan : 2 Dokumen

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Penjelasan : Penyusunan RKA-SKPD mendukung misi ini karena setiap alokasi anggaran DPMPTSP diarahkan pada penguatan investasi, perizinan, dan fasilitasi usaha berbasis potensi lokal, sehingga penganggaran benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah

G. Jenis Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan, rapat koordinasi, dan input data perencanaan.

H. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Input / Masukan : Rp 1.271.000,-
2. Output / Keluaran : Dokumen RKA-SKPD Tahun 2027 dan Dokumen RKA-P Tahun 2026
3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

1. Rapat koordinasi internal
2. Koordinasi dengan BAPPERIDA dan Bidang Anggaran
3. Penyusunan Draf RKA-SKPD
4. Penginputan pada Aplikasi SIPD-RI

J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Desember 2026
Teknis Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RKAP-SKPD 2026													
1	Proses pergeseran anggaran: usulan → pembahasan TAPD → input RKA Pergeseran di SIPD												
2	Proses perubahan anggaran: usulan → pembahasan TAPD/DPRD → penetapan → input di SIPD hingga DPPA												
3	Finalisasi RKA-P 2026 dan Penetapan DPPA 2026												
RKA-SKPD 2027													
1	Identifikasi kebutuhan → usulan → Input RKA 2027 ke SIPD.												
2	Finalisasi RKA 2027 di SIPD-RI (sinkronisasi dengan KUA-PPAS/APBD 2027)												

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD Yang Terkait : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang Terkait : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md

NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang : Evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan instrumen penting untuk mengukur ketercapaian sasaran program dan kegiatan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan dokumen akuntabilitas, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja, serta Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Dengan adanya evaluasi berkala, perangkat daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, untuk mendukung penerapan manajemen mutu pelayanan publik, DPMPTSP melaksanakan resertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan ini bertujuan memastikan keberlanjutan standar mutu layanan, meskipun tidak secara langsung menjadi indikator kinerja sub kegiatan.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis, terukur, dan akuntabel..
2. Tujuan :
 - a. Menyediakan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Memberikan dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja;
 - c. Mendukung penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahunan.

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp 32.496.000,-

E. Volume Kegiatan : 15 Laporan

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Penjelasan : Evaluasi kinerja perangkat daerah dan pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015 mendukung misi ini dengan meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan memastikan keberlanjutan standar mutu pelayanan publik

- G. Jenis Kegiatan : Evaluasi dan monitoring kinerja triwulanan.
Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Penyusunan dokumen RTP dan pemantauan pelaksanaannya.
Penyusunan LKjIP.
Penyusunan perjanjian kinerja (awal & perubahan).
Penyusunan laporan kinerja triwulanan.
Resertifikasi ISO 9001:2015 (penunjang mutu, tidak menjadi indikator utama).

H. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Input / Masukan : Rp 32.496.000,-
2. Output / Keluaran : Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (BA, Laporan Monev, RTP, LKjIP, Perjanjian Kinerja, LKj Triwulan)
3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

1. Rapat evaluasi dan monitoring kinerja triwulanan;
2. Desk Evaluasi RKPD Triwulanan;
3. Penyusunan dan Pemantauan RTP;
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja (awal & perubahan);
5. Penyusunan LKj Triwulanan;
6. Pelaksanaan Resertifikasi ISO 9001:2015 (tidak menjadi indikator output).

J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Desember 2026
Teknis Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja												
2	Penyusunan LKJP, LPPD, dan LKPj												
3	Monev capaian kinerja internal dan Desk Evaluasi RKPD/Renja Triwulanan												
4	Penyusunan Monev RTP												
5	Penyusunan LKj Triwulanan												
6	Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja												
7	Penyusunan RTP 2027												
8	Rapat Evaluasi Akhir Tahun												
9	Koordinasi internal dan eksternal												
10	Penerapan ISO 9001:2015												
11	Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015												

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD Yang Terkait : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang Terkait : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md
NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	: Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A. Latar Belakang : Penyediaan gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan pegawai sekaligus memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan setiap bulan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Menyediakan gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan :
 - a. Menjamin terpenuhinya hak-hak keuangan ASN;
 - b. Memberikan kepastian pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan;

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp 2.863.423.000,-

E. Volume Kegiatan : 23 Orang/bulan

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Penjelasan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN mendukung misi ini karena kesejahteraan ASN merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan kualitas pelayanan publik

G. Jenis Kegiatan : Pengelolaan data gaji dan tunjangan ASN;
Proses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan.

H. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Input / Masukan : Rp 32.496.000,-
2. Output / Keluaran : Pembayaran gaji dan tunjangan untuk 23 ASN per bulan;
3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

1. Pengumpulan dan verifikasi data ASN penerima gaji dan tunjangan.
2. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan.
3. Proses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan melalui bendahara pengeluaran.
4. Pelaporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN

J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Desember 2026 Teknis Kegiatan

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD Yang Terkait : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang Terkait : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md
NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	: Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

A. Latar Belakang : Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui kegiatan ini, setiap transaksi keuangan SKPD dicatat, dikelola, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan keuangan.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah.
2. Tujuan :
 - a. Menjamin ketertiban administrasi keuangan SKPD;
 - b. Menyediakan dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan yang akurat;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp 36.300.000,-

E. Volume Kegiatan : 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal

2. Penjelasan : Pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang transparan dan akuntabel memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, program-program DPMPTSP yang mendukung investasi dan pemanfaatan potensi lokal dapat dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
- G. Jenis Kegiatan :
 - Pencatatan transaksi keuangan.
 - Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan.
 - Pengujian/verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.
 - Penyusunan laporan hasil verifikasi keuangan SKPD.
- H. Indikator Kinerja Kegiatan
1. Input / Masukan : Rp 36.300.000,-
2. Output / Keluaran : Dokumen penatausahaan dan hasil pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah
- I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan
1. Pengumpulan dan pencatatan transaksi keuangan SKPD.
2. Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan (SPJ, buku kas umum, register, dsb).
3. Pengujian/verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.
4. Penyusunan laporan hasil verifikasi keuangan.
5. Koordinasi dengan BPKAD terkait penatausahaan dan verifikasi
- J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Desember 2026
- Teknis Kegiatan
- K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan
1. PPTK
- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasir Kegiatan
- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
Yang Terkait kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang
Terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md
NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- A. Latar Belakang : Laporan Keuangan SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelola dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat informasi mengenai realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan SKPD menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK.

Untuk menjamin penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai regulasi, diperlukan koordinasi yang intensif dengan BPKAD serta verifikasi internal. Oleh karena itu, sub kegiatan ini menjadi krusial bagi DPMPTSP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Menyusun laporan keuangan SKPD akhir tahun secara tertib administrasi dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
2. Tujuan :
 - a. Menyediakan laporan keuangan SKPD yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
 - c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan.

- C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

- D. Anggaran Kegiatan : Rp 1.178.000,-

- E. Volume Kegiatan : 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029
1. Misi Yang Terkait : Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal
 2. Penjelasan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan laporan yang transparan, akurat, dan sesuai regulasi, kepercayaan publik meningkat sehingga anggaran dapat lebih efektif mendukung program-program DPMPTSP yang berorientasi pada penguatan investasi dan pemanfaatan potensi lokal. Tata kelola keuangan yang tertib ini memastikan pembangunan ekonomi daerah berjalan mandiri dan berkelanjutan.
- G. Jenis Kegiatan :
 - Koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan BPKAD.
 - Rekonsiliasi data realisasi anggaran.
 - Penyusunan draft laporan keuangan SKPD.
 - Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK).
 - Finalisasi laporan keuangan akhir tahun.
- H. Indikator Kinerja Kegiatan
1. Input / Masukan : Rp 1.178.000,-
 2. Output / Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 3. Outcome / Hasil : Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah
- I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan
1. Koordinasi internal dan eksternal dengan BPKAD.
 2. Pengumpulan dan verifikasi data realisasi anggaran.
 3. Penyusunan draft laporan keuangan SKPD.
 4. Penyusunan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).
 5. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan BPKAD.s
 6. Finalisasi dan penyerahan dokumen laporan keuangan SKPD akhir tahun.

J. Waktu Pelaksanaan : Januari sd. Desember 2026
Teknis Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonsiliasi APBD Tahun 2025												
2	Rekonsiliasi Barang Tahun 2025												
3	Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)												
4	Rekonsiliasi APBD Triwulanan												
5	Rekonsiliasi Barang Semester I 2026												

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Muhammad Muzni Kharis, A.Md
- NIP : 19810223 200902 1 003
- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Didik Yogo Suro Prasajo, S.Kom
- NIP : 19980109 202203 1 007
- Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi SKPD Yang Terkait kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Fungsi SKPD Yang Terkait : (1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
(3) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md

NIP. 19810223 200902 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Penanaman Modal
Program	:	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- A. Latar Belakang :
- Di era digital saat ini, data dan informasi telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai setara dengan sumber daya ekonomi lainnya. Setiap aktivitas, baik dalam sektor pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sosial, menghasilkan data yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan akurat.
- Pengolahan data merupakan tahap penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tanpa adanya pengolahan yang sistematis, data hanya menjadi sekumpulan angka atau catatan yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan pengolahan yang baik, data dapat diklasifikasikan, dianalisis, serta diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai kepentingan.
- Selanjutnya, penyajian data dan informasi memegang peran penting dalam memastikan hasil pengolahan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Informasi yang disajikan secara jelas, transparan, dan komunikatif akan meningkatkan kualitas pemahaman serta mengurangi potensi salah tafsir. Bentuk penyajian yang efektif, seperti tabel, grafik, maupun dashboard interaktif, dapat membantu pengguna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap suatu permasalahan atau kondisi tertentu.
- Pemanfaatan data dan informasi yang optimal menjadi kunci dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program maupun kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, data yang akurat dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara dalam dunia usaha, informasi yang tepat dapat membantu perusahaan memahami tren pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing.

Dengan demikian, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi bukan hanya sekadar proses teknis, melainkan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada ilmu pengetahuan.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dimaksud :
 - Melaksanakan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dan Terintegrasi secara Elektronik
 - Memperkuat Jaringan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan berbagai kalangan baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Tujuan : Adapaun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah :
 - Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
 - Mendukung Penguatan terbentuknya Pusat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tingkat Kabupaten/Kota
 - Memperkuat jaringan data dan Informasi
 - Membangun kerjasama dengan para pihak / stekholder yang berkompeten dengan data dan informasi penanaman modal.
- C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
- D. Anggaran Kegiatan : 93.356.000
- E. Volume Kegiatan : 4 Dokumen
- F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029
 1. Misi Yang Terkait : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
 2. Penjelasan : Data dan Informasi Penanaman Modal harus selalu diperbarui dalam bentuk publikasi informasi dan Sinkronisasi data dengansistem Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui saluran informasi yang tersedia.
- G. Jenis Kegiatan :
 - Gaji Tenaga Kegiatan
 - Rapat Koordinasi

H. Indikator Kinerja Kegiatan

- A. Input / Masukan : 93.356.000
- B. Output / Keluaran : 1 Kegiatan
- C. Outcome / Hasil : Terkelolanya Data dan Informasi Penanaman Modal

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Pagu
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 18.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.438.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 84.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 3.924.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 252.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 324.000,00
JUMLAH		Rp. 93.356.000,00

NO	PEKERJAAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
	1 Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan												
	2 Rapat Persiapan												
2	Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal												
	1 Penarikan data dari Sistem OSS												
	2 Pengolahan dan Analisis Data												
	3 Penyajian Data yang diolah												
	4 Penyusunan Laporan												
	5 Pengiriman Laporan Ke Provinsi dan OPD terkait												
	6 Publikasi												
3	Pengolahan Website dan Sosial Media												
	1 Penyusunan Konten/Artikel												
	2 Pemeliharaan Website dan Media Sosial												
	3 Koordinasi Lintas Kelompok												
	4 Penyusunan Laporan												
	5 Publikasi Hasil Kerja												
4	Monitoring dan Evaluasi												
	1 Rapat Evaluasi												
	2 Penyelesaian Administrasi												

J. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2026

Teknis Kegiatan

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

A. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, M.M
- NIP : 19731117 199903 1006
- Jabatan : Panata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

B. Kasir Kegiatan

- Nama : Muhammad Ilham Insani, S.Kom
- NIP : 19960522 202521 1 019
- Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

- A. Tugas Pokok SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
Yang Terkait kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- B. Fungsi SKPD Yang : Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
Terkait dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten/Kota

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan

P P T K,



Arif Karyadi, S.Sos
NIP. 197110171999031007



Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
NIP. 197311171999031003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Penanaman Modal
Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

A. Latar Belakang : Dalam rangka penciptaan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif di Kota Pekalongan, diperlukan kepastian hukum melalui penetapan kebijakan yang mendukung investasi, sinkron dengan kebijakan di tingkat pusat, dan harmonis dengan kebijakan di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, upaya pengembangan iklim penanaman modal yang dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota yaitu Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Tujuan :
 - a. Memberikan landasan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan/penyesuaian peraturan daerah (Perda/Perwal/SK) di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha;
 - b. Mendukung kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
2. Sasaran : Tersedianya dokumen rekomendasi dan rancangan kebijakan dalam penyusunan/penyesuaian peraturan daerah (Perda/Perwal/SK) di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha.

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

Kerangka Acuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Anggaran Kegiatan : Rp. 4.800.000,00

E. Volume Kegiatan : 1 dokumen / 12 bulan

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
2. Penjelasan : Dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk berusaha/berinvestasi, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif yang mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian di daerah.

G. Jenis Kegiatan :
a. Pengkajian peraturan
b. Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan
c. Perumusan dokumen kebijakan

H. Indikator Kinerja Kegiatan

A. Input / Masukan : Rp. 4.800.000,00

B. Output / Keluaran : Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (1 dokumen).

C. Outcome / Hasil : Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/ Keputusan Kepala Daerah/ Keputusan Perangkat Daerah dalam rangka pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal (1 dokumen).

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Pagu
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.600.000,00
Jumlah		Rp 4.800.000,00

NO	PEKERJAAN	BULAN												KETR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Persiapan													
	1 Perencanaan kegiatan													
	2 Pembentukan tim kegiatan													
II	Pelaksanaan													
	1 Pengkajian peraturan													
	2 Rapat koordinasi													
	3 Penyusunan rekomendasi kebijakan													
	4 Penyusunan rancangan dokumen kebijakan													
	5 Pengesahan													
	6 Pendokumentasian kebijakan													
III	Monitoring dan Evaluasi													
	1 SPJ													
	2 Pelaporan kepada Kepala DPMPSTP													

J. Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2026
Teknis Kegiatan

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

A. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
- NIP : 19731117 199903 1 006
- Jabatan : JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

B. Kasir Kegiatan

- Nama : Millatina Hanifah, S.E.Sy
- NIP : 19921001 202012 2 013
- Jabatan : JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

- A. Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi SKPD Yang kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Terkait pelayanan terpadu satu pintu.
- B. Fungsi SKPD : perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan Yang Terkait pelayanan terpadu satu pintu

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 197110171999031007

P P T K,



HARRY RUDIYANTO, S.Kom., M.M
NIP. 197311171999031006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	: Urusan Penanaman Modal
Program	: Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

A. Latar Belakang : Dalam rangka penciptaan iklim ekonomi dan investasi yang berdaya saing di Kota Pekalongan, diperlukan pemetaan potensi/pejuang investasi di daerah dan penyediaan informasi investasi yang terpadu dan akurat kepada masyarakat/calon investor.

Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Pekalongan akan hal tersebut diwujudkan melalui penyediaan dokumen peta potensi investasi daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis terkait.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Tujuan : Penyediaan dokumen Peta Potensi Investasi Kota Pekalongan
2. Sasaran : Tersedianya dokumen Peta Potensi Investasi Kota Pekalongan

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp. 21.500.000,00

E. Volume Kegiatan : 1 dokumen / 12 bulan

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
2. Penjelasan : Dengan tersedianya peta potensi investasi daerah, diharapkan dapat memberikan informasi potensi/pejuang invetasi yang terpadu dan akurat kepada masyarakat/calon investor, meningkatkan minat investasi di daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah

G. Jenis Kegiatan : Penyusunan dokumen Peta Potensi Investasi Kota Pekalongan

Kerangka Acuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

H. Indikator Kinerja Kegiatan

- A. Input / Masukan : Rp. 21.500.000,00
- B. Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (1 dokumen).
- C. Outcome / Hasil : Peta potensi Penanaman Modal yang dipublikasikan (1 dokumen).

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Pagu
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.680.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.009.00013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp. 14.500.000,00
Jumlah		Rp. 21.500.000,00

NO	PEKERJAAN	BULAN												KETR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Persiapan													
	1 Perencanaan kegiatan													
	2 Pembentukan tim kegiatan													
	3 Rapat persiapan													
II	Pelaksanaan													
	1 Proses PBJ - kerjasama dengan penyedia													
	2 Rapat koordinasi													
	3 Penyusunan dokumen peta potensi investasi													
	4 Pemaparan / expose													
	5 Pendokumentasian/publikasi pada sistem informasi													
III	Monitoring dan Evaluasi													
	1 SPJ													
	2 Pelaporan kepada Kepala DPMPTSP													

J. Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2026
Teknis Kegiatan

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

A. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
- NIP : 19731117 199903 1 006
- Jabatan : JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

B. Kasir Kegiatan

- Nama : Millatina Hanifah, S.E.Sy
- NIP : 19921001 202012 2 013
- Jabatan : JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

- A. Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi SKPD Yang kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Terkait pelayanan terpadu satu pintu.
- B. Fungsi SKPD : penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi Yang Terkait daerah

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 197110171999031007

P P T K,



HARRY RUDIYANTO, S.Kom., M.M
NIP. 197311171999031006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan
Bidang Urusan	:	Urusan Penanaman Modal
Program	:	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

A. Latar Belakang : Dalam peningkatan capai nilai investasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diperlukan pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang berdampak dalam pelaksanaan penanaman modal perlu di tindaklanuti kepada pelaku usaha sebagai perhatian pemerintah kepada pelaku usaha

Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara rutin untuk mengupdate informasi pelaku usaha ;

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud :
 - a. Upaya meningkatkan capaian realisasi investasi di kota pekalongan.
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan :
 - a. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pemahaman mekanisme pelaporan LKPM pelaku usaha
 - b. Menyampaikan update informasi kepada pelaku usaha
 - c. Bisnis Link and Match

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp. 44.016.000, 00

E. Volume Kegiatan : 1 Kali

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif,merata dan Inklusif
2. Penjelasan : Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara rutin untuk mengupdate informasi pelaku usaha ;

- G. Jenis Kegiatan : a. Bimtek/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)
b. Bimtek/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

H. Indikator Kinerja Kegiatan

- A. Input / Masukan : Rp44.016.000, 00
- B. Output / Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (25 Pelaku Usaha)
- C. Outcome / Hasil : Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal (25 perusahaan)

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Pagu
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	646.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.600.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	520.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.308.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.850.000
Jumlah		44.016.000

URAIAN	BULAN																KETR								
	APRIL				MEI				JUNI				SEPTEMBER					BULAN OKTOBER				NOVEMBER			
PERSIAPAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Administrasi																									
Acara dan Akomodasi																									
Perencanaan dan Dokumentasi																									
PELAKSANAAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Administrasi																									
Acara dan Akomodasi																									
Perencanaan dan Dokumentasi																									
MONEV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Administrasi																									
SPJ																									
Penyusunan Laporan																									
Monitoring Pekerjaan																									

J. Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2026

Teknis Kegiatan

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

A. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
- NIP : 19731117 199903 1 003
- Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

B. Kasir Kegiatan

- Nama : Achmad Adi Kusuma, S.Kom
- NIP : 19930526 202521 0 041
- Jabatan : Penata Kelelola Penanaman Modal Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

- A. Tugas Pokok SKPD : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Yang Terkait kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- B. Fungsi SKPD Yang Terkait : pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 197110171999031007

P P T K,



HARRY RUDIYANTO, S. Kom, MM
NIP. 197311171999031003

Kerangka Acuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PROGRAM S K P D	: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL : DPMPSTP KOTA PEKALONGAN

I. LATAR BELAKANG : Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem oss; tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko; pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan sanksi, maka diperlukan adanya komitmen aparaturnya dalam melaksanakan pelayanan prima dalam rangka pelayanan terpadu perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- A. TUJUAN : Terlaksananya administrasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha
- B. SASARAN : 3086 Pelaku Usaha

III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan

IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 441.699.000,00

V. VOLUME KEGIATAN : 12 bulan

VI. KAITAN KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PEKALONGAN 2021-2026

- A. MISI YANG TERKAIT : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
- B. PENJELASAN : Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat secara optimal

VII. JENIS KEGIATAN : -

VIII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- A. INPUT / MASUKAN : Rp. 441.699.000,00
- B. OUT PUT / KELUARAN : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- C. OUT COME / HASIL : Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

IX. GARIS GARIS BESAR KOMPONEN KEGIATAN / SUB – SUB KEGIATAN / PAKET – PAKET PEKERJAAN / ISI KEGIATAN

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Pelaporan

X. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE

- A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s/d Desember 2026
- B. TIME SCHEDULE : Terlampir

XI. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

- A. P P T K :
 - ☐ N A M A : AMAT MUSLICH,S.A.P
 - ☐ N I P : 19720205 199203 1 010
 - ☐ J A B A T A N : Penata Perizinan Ahli Madya
- B. Kasir Kegiatan :
 - ☐ N A M A : PURNOMO, S.H.
 - ☐ N I P : 19740607 200701 1 008
 - ☐ J A B A T A N : Penata Perizinan Ahli Muda

XII. URAIAN TUPOKSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN

- A. TUGAS POKOK SKPD YANG TERKAIT : Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.
- B. FUNGSI SKPD YANG TERKAIT : Menyusun bahan perumusan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan berusaha dan non berusaha, inovasi layanan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK,



AMAT MUSLICH, S.A.P
Pembina
NIP. 19720205 199203 1 010

JADWAL KEGIATAN
PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERSIAPAN												
2	PELAKSANAAN												
3	PELAPORAN												

Pekalongan, 4 Agustus 2025
PPTK,



AMAT MUSLICH, S.A.P

Pembina

NIP. 19720205 199203 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PROGRAM S K P D	: PELAYANAN PENANAMAN MODAL : DPMPTSP KOTA PEKALONGAN

I. LATAR BELAKANG : Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem oss; tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko; pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan sanksi, maka diperlukan adanya komitmen aparaturnya dalam melaksanakan pelayanan prima dalam rangka pelayanan terpadu perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- A. TUJUAN : Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha
- B. SASARAN : 60 Kegiatan Usaha

III. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan

IV. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 213.784.000,00

V. VOLUME KEGIATAN : 12 bulan

VI. KAITAN KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PEKALONGAN 2021-2026

- A. MISI YANG TERKAIT : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
- B. PENJELASAN : Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat secara optimal

VII. JENIS KEGIATAN : -

VIII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- A. INPUT / MASUKAN : Rp. 213.784.000,00
- B. OUT PUT / KELUARAN : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha
- C. OUT COME / HASIL : Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

IX. GARIS GARIS BESAR KOMPONEN KEGIATAN / SUB – SUB KEGIATAN / PAKET – PAKET PEKERJAAN / ISI KEGIATAN

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Pelaporan

X. WAKTU PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE

- A. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s/d Desember 2026
- B. TIME SCHEDULE : Terlampir

XI. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

- A. P P T K :
 - ☐ N A M A : AMAT MUSLICH, S.A.P
 - ☐ N I P : 19720205 199203 1 010
 - ☐ J A B A T A N : Penata Perizinan Ahli Madya
- B. Kasir Kegiatan :
 - ☐ N A M A : NOOR FALAISIFA, A.Md.
 - ☐ N I P : 19960813 202203 2 018
 - ☐ J A B A T A N : Pengolah Data dan Informasi

XII. URAIAN TUPOKSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN

- A. TUGAS POKOK SKPD YANG TERKAIT : Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan
- B. FUNGSI SKPD YANG TERKAIT : Menyusun bahan perumusan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan berusaha dan non berusaha, inovasi layanan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007

PPTK.



AMAT MUSLICH, S.A.P
Pembina
NIP. 19720205 199203 1 010

JADWAL KEGIATAN
PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERSIAPAN												
2	PELAKSANAAN												
3	PELAPORAN												

Pekalongan, 4 Agustus 2025

DPTK



AMAT MUSLICH, S.A.P

Pembina

NIP. 19720205 199203 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	:	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya

A. LATAR BELAKANG : Dalam peningkatan capai nilai investasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diperlukan pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang berdampak dalam pelaksanaan penanaman modal perlu di tindaklanuti kepada pelaku usaha sebagai perhatian pemerintah kepada pelaku usaha

Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara rutin untuk mengupdate informasi pelaku usaha dan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya;

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud : Memfasilitasi kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan usahanya
2. Tujuan : Terkelolanya Pembinaan Kepada Pelaku Usaha dan Penyelesaian permasalahannya
Meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

C. LOKASI KEGIATAN : Kota Pekalongan.

D. ANGGARAN KEGIATAN : Rp. 35.000.000,00

E. VOLUME KEGIATAN : 1 Kali

F. KAITAN KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PEKALONGAN 2021-2026

1. MISI YANG TERKAIT

:

Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
2. PENJELASAN

:

Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara rutin untuk mengupdate informasi pelaku usaha dan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya;
- G. JENIS KEGIATAN

:

Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan
- H. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. INPUT / MASUKAN

:

Rp. 35.000.000,00

B. OUT PUT / KELUARAN

:

25 Kegiatan Usaha

C. OUT COME / HASIL

:

Terkelolanya Pelaku Usaha

I. GARIS GARIS BESAR KOMPONEN KEGIATAN / SUB – SUB KEGIATAN / PAKET – PAKET PEKERJAAN / ISI KEGIATAN
- | Kode Rekening | Uraian | Pagu |
|--------------------|---|---------------|
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover | Rp 600.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak | Rp 1.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja makan dan minum rapat | Rp 11.500.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara, dan panitia | Rp 8.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja jasa tenaga caraka | Rp 400.000 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja HonorariumPenanggungjawabanPengelola Keuangan (Kasir) | Rp 2.400.000 |
| 5.1.02.02.012.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp 2.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp 7.800.000 |
| Jumlah | | Rp 35.000.000 |
- | NO | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | | KETR |
|----|--------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |
| 1 | PERSIAPAN | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| | a. Administrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Acara dan Akomodasi | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Perencanaan dan Dokumentasi | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PELAKSANAAN | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| | a. Administrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Acara dan Akomodasi | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Perencanaan dan Dokumentasi | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MONEV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| | a. Administrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | SPJ | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitoring Pekerjaan | | | | | | | | | | | | | |
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

J. WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d. Desember 2026.

K. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

- A. P P T K

▪ N A M A

▪ N I P

▪ J A B A T A N

:

: Harry Rudiyanto, S.Kom, MM

: 19731117 199903 1 006

: Panata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
- B. Kasir Kegiatan

▪ N A M A

▪ N I P

▪ J A B A T A N

:

: Nur Hanifah, A. Md

: 199960917 202203 2 021

: Pengolah Data dan Informasi

L. URAIAN TUPOKSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN

- A. TUGAS POKOK SKPD YANG TERKAIT

:

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- B. FUNGSI SKPD YANG TERKAIT

:

pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Pit KEPALA DPMPSTP KOTA PEKALONGAN



Arif Karyadi, S.Sos
Pembina Utama Muda
197110171999031007

P P T K



HARRY RUDIYANTO, S. Kom, MM
Pembina Tingkat I
197311171999031006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program	:	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Penanaman Modal

- A. Latar Belakang :
- Dalam peningkatan capai nilai investasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diperlukan pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang berdampak dalam pelaksanaan penanaman modal perlu di tindaklanuti kepada pelaku usaha sebagai perhatian pemerintah kepada pelaku usaha

Pengawasan Penanaman Modal dilakukan secara rutin untuk menganalisa dan memverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha; serta melakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

B. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan

1. Maksud :
- Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
2. Tujuan :
- a. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU
- b. Mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha
- c. Memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal

C. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

D. Anggaran Kegiatan : Rp. 20.000.000,00

E. Volume Kegiatan : 25 Kegiatan Usaha

F. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
2. Penjelasan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam bentuk pengawasan kepada pelaku usaha perlu dilakukan sebagai kontrol guna memastikan kegiatan usaha dilakukan sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha

G. Jenis Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal

H. Indikator Kinerja Kegiatan

A. Input / Masukan : Rp. 20.000.000,00

B. Output / Keluaran : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (25 Pelaku Kegiatan Usaha)

C. Outcome / Hasil : Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal (25 perusahaan)

I. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Pagu
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.070.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000
Jumlah		20.000.000

J. Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2026

Kerangka Acuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Teknis Kegiatan

SCHEDULE PENGAWASAN PENANAMAN MODAL														
No	Pekerjaan	Bulan												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Analisa dan Verifikasi Data													
	- persiapan pengawasan OSS													
	-perisapan pengawasan manual													
2	Inspeksi lapangan													
	OSS													
	Manual													
3	Evaluasi Penilaian Kepatuhan													
	-Berita acara pengawasan													

K. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

A. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
- NIP : 19731117 199903 1 003
- Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

B. Kasir Kegiatan

- Nama : Nadya Ayu Popi Haluansa, S.E
- NIP : 19961115 202012 2 016
- Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

L. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

- A. Tugas Pokok SKPD : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- B. Fungsi SKPD Yang Terkait : pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos.
NIP. 197110171999031007

P P T K,



HARRY RUDİYANTO, S. Kom, MM
NIP. 197311171999031003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S K P D	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Penanaman Modal
Program	:	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

1. Latar Belakang : Dalam peningkatan capaian nilai investasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diperlukan peminatan terhadap investasi yang ada pada lingkup Peluang dan Potensi Investasi. Mendapatkan peminatan investasi dapat dilaksanakan dengan Promosi terhadap Peluang dan Potensi Investasi dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Promosi Penanaman modal sebagai sarana business link and machth antara masyarakat/ investor dengan pemilik proyek yang siap ditawarkan.
Berdasarkan Peraturan BKPM RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal, Kegiatan promosi meliputi :
 - 1 Publikasi informasi melalui sarana promosi
 - 2 Penyelenggaraan dan atau partisipasi pada pameran penanaman modal (luring/daring)
 - 3 Seminar penanaman modal, forum bisnis dan atau pertemuan tatap muka
 - 4 Penerimaan misi dan atau pendampingan penanaman modal
2. Tujuan Dan Sasaran Sub Kegiatan
 1. Maksud : Mempromosikan Peluang dan potensi Investasi dilingkungan Pemerintah Kota pekalongan
 2. Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain : Publikasi informasi melalui sarana promosi, Penyelenggaraan dan atau partisipasi pada pameran penanaman modal (luring/daring), Seminar penanaman modal, forum bisnis dan atau pertemuan tatap muka
Penerimaan misi dan atau pendampingan penanaman modal
3. Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan
4. Anggaran Kegiatan : Rp. 15.000.000,00
5. Volume Kegiatan : 1 Kali

6. Kaitan Kegiatan Dengan Visi Dan Misi RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029

1. Misi Yang Terkait : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan
2. Penjelasan : Promosi Penanaman modal sebagai sarana business link and match antara masyarakat investor dengan pemilik proyek yang siap ditawarkan
7. Jenis Kegiatan : Berdasarkan Peraturan BKPM RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal, Kegiatan promosi meliputi : Publikasi informasi melalui sarana promosi, atau Penyelenggaraan dan atau partisipasi pada pameran penanaman modal (luring/daring), atau Seminar penanaman modal, forum bisnis dan atau pertemuan tatap muka, atau Penerimaan misi dan atau pendampingan penanaman modal
8. Indikator Kinerja Kegiatan
 1. Input / Masukan : Rp. 15.000.000,00
 2. Output / Keluaran : 1 Dokumen
 3. Outcome / Hasil : Pertumbuhan investasi
9. Garis Garis Besar Komponen Kegiatan / Sub – Sub Kegiatan / Paket – Paket Pekerjaan / Isi Kegiatan

kode Rekening	uraian	Pagu
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Promosi	5.520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.180.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.700.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000
Jumlah		Rp15.000.000

NO	PEKERJAAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
	1 Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan												
	2 Rapat Persiapan												
2	Pelaksanaan												
	2.1 Promosi Investasi Melalui Media Elektronik												
	1 Kerjasama dengan Media Publikasi												
	2 Publikasi Hasil Kerja												
	2.3 Penyelenggaraan kegiatan Promosi												
	1 Persiapan												
	2 Pelaksanaan FGD Business & Link Match												
	3 Penyusunan Laporan												
3	Monitoring dan Evaluasi												
	1 Monitoring Kegiatan												
	2 Rapat Evaluasi												
	3 Penyelesaian Administrasi												

10. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
Teknis Kegiatan

11. Pelaksanaan Teknis Kegiatan

1. PPTK

- Nama : Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
- NIP : 19731117 199903 1 003
- Jabatan : PF PKPM Ahli Madya

2. Kasir Kegiatan

- Nama : Ahmad Rozi, S.E
- NIP : 19910205 202203 1 003
- Jabatan : PF PKPM Ahli Pertama

12. Uraian Tupoksi Yang Terkait Dengan Kegiatan

1. Tugas Pokok SKPD : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Yang Terkait daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.
2. Fungsi SKPD Yang : penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
Terkait kewenangan Daerah;

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan



Arif Karyadi, S.Sos
NIP 197110171999031007

P P T K,



Harry Rudiyanto, S.Kom, MM
NIP 197311171999031003